

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sejarah buruk penjajahan Jepang di Asia sangat melekat dan bekasnya pun tidak akan pernah hilang dari ingatan terutama negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia, dimana Jepang dengan agresifnya dan membabi buta mengeksploitasi penduduk lokal untuk menjadi budak mereka. Baik laki-laki maupun perempuan dipaksa untuk melakukan semua yang diperintahkan secara kejam untuk mewujudkan ambisinya, seperti menjadi pekerja romusha dan jugun ianfu.

Perang Dunia II yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki menjadi momentum kehancuran Jepang. Disisi lain menjadi kesempatan negara jajahan untuk memerdekakan diri. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyatakan penyerahan diri terhadap sekutu, diikuti dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Takluknya Jepang terhadap Sekutu, memaksanya untuk menyetujui bahwa Jepang merupakan negara yang cinta damai sehingga tidak diperbolehkan menggunakan perang sebagai instrumen kebijakan luar negerinya serta melarang Jepang untuk memiliki angkatan bersenjata atau militer. Efek penyerahan diri Jepang berimbas pada keterpurukan perekonomiannya.

Perdana menteri Jepang pada masa 1946-1954 yaitu Shigeru Yoshida melihat kondisi Jepang menyadari bahwa Jepang harus bangkit. Darisitulah bermula perubahan politik luar negeri Jepang dari konsepsi militer menjadi konsepsi ekonomi. Dengan doktrin-doktrin yang diciptakan oleh para pemimpinnya secara signifikan membuat kondisi Jepang kembali pulih. Perbaikan hubungan baik ke negara-negara Asia

Tenggara sendiri pada tahun 1950-an dan 1960-an mulai dijalankan melalui perdagangan dan investasi, yang merupakan instrumen yang membantu memulihkan stabilitas Jepang. Ini juga menjadi kabar baik bagi Jepang dan Asia Tenggara mengingat sebelumnya Jepang memiliki citra buruk di kawasan Asia terutama di Asia Tenggara.

Menurut Eiji Oguma, professor dari Universitas Keio Japan (Eiji, 2008), dijelaskan bahwa Jepang setelah setelah Perang Dunia II mengalami tiga perkembangan periode. Yaitu periode pertama setelah Perang Dunia II (*First Post War*) dari tahun 1945 sampai 1954, dimana pada saat ini ekonomi Jepang benar-benar terpuruk. Periode kedua, yaitu setelah perang dunia II kedua (*Second Post War*) tahun 1955-1991. Dimasa ini pertumbuhan Jepang berkembang secara pesat dalam segi ekonomi dan industri. Hal ini berkat berbagai kebijakan dalam negeri dan luar negeri yang dibuat oleh para pemimpin negara. Periode ketiga (*Third Post War*) tahun 1992 hingga sekarang.

Pada tahun 1974 Jepang menggagas program SEAYP (Ship for South East Asian Youth Program) dimana anggotanya adalah negara-negara kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Program ini hingga kini masih berjalan setiap tahunnya dan telah memasuki periode ke-44. Total peserta dalam program ini adalah 330 orang. Dapat kita iutng sudah ada belasan ribu alumni dari program SSEAYP. Dengan biaya yang tidak sedikit Jepang tetap bertahan menjadi sponsor terbesar dalam program ini. Dapat dibayangkan berapa besar dana yang sudah dikeluarkan oleh Jepang. Program SSEAYP saat ini diampu oleh Cabinet of Japan dimana Jepang menjadi sponsor utama. Kesan yang terlihat adalah Jepang tidak main-main dalam membina kembali hubungan baik dengan negara-negara Asia Tenggara.

Program SSEAYP merupakan program kerjasama regional yang menurut para stakeholder memiliki nilai strategis dan menguntungkan baik bagi individu maupun kelembagaan. Dalam program ini peserta dari perwakilan negara akan diberikan kesempatan untuk menampilkan pertunjukan budaya dan presentasi tentang pariwisata negara masing-masing. Pada dasarnya kebudayaan bersifat komunikatif, yang dapat

dipahami, bahkan juga oleh masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Kebudayaan juga bersifat manusiawi: yaitu dapat lebih mendekatkan bangsa yang satu dengan lainnya. Sifat-sifat positif dari kebudayaan inilah yang bisa membuka jalan bagi tercapainya tujuan suatu negara dalam hubungan kerjasama internasional. Diplomasi yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan program *SSEAYP* adalah merupakan bagian dari *soft diplomacy*. Kekayaan seni budaya, merupakan *soft power* yang dimiliki setiap negara dan telah terbukti memiliki daya tarik serta pesona tersendiri di kalangan masyarakat asing. Seni budaya merupakan salah satu alat diplomasi yang cenderung dianggap bebas kepentingan politik maupun ekonomi (coretan kelam).

B. Latar Belakang Masalah

Jepang merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau yang berpenduduk sekitar 128 juta orang dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Menurut mitologi tradisional Jepang didirikan oleh kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM dimana pada saat itu dimulailah mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun, sepanjang sejarahnya, kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern, di tangan perdana menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai dan lengkap dengan sistem pertahanan modern.

Pasca Perang Dunia II yang ditandai oleh jatuhnya bom atom Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan keterpurukan bagi Jepang. Kerusakan fatal Infrastruktur, bencana kemanusiaan, ambruknya ekonomi, dan polusi kimia nuklir. Kekacauan dalam negeri yang ada mengharuskan Jepang untuk membuat perubahan secara besar

di segala bidang. Seperti yang tersirat dalam sejarah kelam nenek moyang kita, dimana Jepang menjajah Indonesia menunjukkan bahwa Jepang merupakan negara yang sangat agresif. Penyerangan Hiroshima dan Nagasaki menyadarkan Jepang untuk akhirnya bersikap lunak. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyatakan penyerahan diri terhadap sekutu.

Perdana menteri Jepang pada masa 1946-1954 yaitu Shigeru Yoshida melihat kondisi Jepang yang terpuruk, baik secara politik dan ekonomi. Secara politik dapat dilihat dari daerah-daerah jajahan Jepang yang lepas, secara ekonomi, terlihat dalam hyperinflasi yang terjadi dari pertengahan tahun 1945 sampai awal tahun 1949. Sebuah evolusi yang mencengangkan di mana Jepang pada awalnya negara yang arogan kemudian menjadi negara yang mau menjalankan kerjasama dalam bidang perekonomian dengan negara lain. Apalagi negara-negara tersebut merupakan daerah bekas jajahannya. Perbaikan hubungan baik ke negara-negara Asia Tenggara sendiri pada tahun 1950-an dan 1960-an mulai dijalankan melalui perdagangan dan investasi, yang merupakan instrumen yang membantu memulihkan stabilitas Jepang dan juga memperbaiki nama baiknya. Namun, Pada awal tahun 1970-an timbul sentimen anti-Jepang di kawasan Asia Tenggara. Sentimen tersebut terjadi karena rasa takut akan dominasi ekonomi Jepang yang ditakutkan akan menimbulkan suatu penjajahan model baru yang berbeda dari penjajahan abad ke-20 dan rasa takut akan militerisme Jepang akibat sejarah pada masa Perang Dunia (PD).

Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan Jepang justru tidak begitu baik dengan negara tetangganya. Jepang berkonflik dengan Korea Utara karena isu peluncuran nuklir dari Korea Utara. Sedangkan dengan China dan Taiwan karena berebut Pulau Sengketa. Padahal kedua negara ini letaknya berdekatan. Khususnya dengan China, Jepang juga memperebutkan Pulau Okonothorisma. Isu terkait perebutan ini karena adanya sumberdaya alam dan cadangan minyak di pulau tersebut. Korea selatan juga masuk dalam daftar negara yang bersengketa dengan Jepang karena sama – sama mengklaim kepemilikan Liancourt Rocks. Hal ini, menurut menyebabkan

posisi geopolitik Jepang sebenarnya diapit oleh musuh – musuh dari negara tetangganya sendiri yang bisa mengancam Jepang suatu saat nanti karena tidak harmonisnya hubungan antar negara tetangga tersebut.

Pada tahun 1974 Jepang menggagas program SEAYP (Ship for South East Asian Youth Program). Saat itu, negara anggota ASEAN masih terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kesepakatan tersebut menjadikan SSEAYP (Ship for South East Asian Youth Program) sebagai salah satu program kerjasama antara Jepang dan ASEAN. Kemudian disusul dengan bergabungnya Brunei Darussalam pada tahun 1985, Vietnam tahun 1996, Laos dan Myanmar tahun 1998, dan Kamboja pada tahun 2000. Tahun ini adalah tahun ke 44 penyelenggaraan SSEAYP. Jepang sendiri menjadi sponsor utama dalam program tersebut salah satunya dengan menyediakan kapal Nippon Maru sebagai tempat bagi para perwakilan negara melakukan kegiatan dan perjalanan ke 5 negara yang ditunjuk. Pemangku kepentingan program saat ini dipegang oleh Cabinet Office of Japan, sedangkan dari Indonesia diampu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar beberapa tujuan utama bagi penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjawab pokok permasalahan dengan menggunakan landasan teori serta membuktikan kebenaran dari hipotesa berdasarkan hasil dari fakta dan data.
2. Mengetahui bagaimana Jepang dalam menjalankan politik luar negeri di kawasan Asia Tenggara
3. Mengetahui tujuan Jepang mengadakan kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara melalui program SSEAYP.

D. Rumusan Masalah

Kondisi Jepang pada pasca Perang Dunia II sungguh mengalami keterpurukan. Hal ini berimbas pada perekonomian dan problematika dalam negeri. Dalam memulihkan kondisi tersebut Jepang perlu untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain yang dapat memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan perekonomian dan sektor lain. Disisi lain, tindakan agresif dan anarki Jepang sungguh meninggalkan trauma mendalam bagi negara-negara jajahannya terutama Indonesia yang dijajah selama 3,5 tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan “ *mengapa Pemerintah Jepang menjadi sponsor utama dalam program SSEAYP (Ship for South East Asian Youth Program)?* ”

E. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat menganalisa masalah hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada maka digunakan rumusan pemikiran sebagai berikut :

1. Teori politik luar negeri

Konsep dasar dari pembuatan sebuah kebijakan dalam suatu negara dipengaruhi oleh beberapa hal. Pembuatan kebijakan itu sendiri merupakan sebuah tindakan politik luar negeri pemerintah untuk menghasilkan, memenuhi peran , mencapai atau mempertahankan tujuan tertentu. Dalam kaitan ini, tindakan suatu negara merupakan bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mendukung atau mengubah tindakan pemerintah negara lain yang berperan dalam menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan negara tersebut (Holsti, 1983).

Chris Brown dalam bukunya *Understanding International Relation* ,memberikan pandangan sederhana dalam pandangan politik luar negeri, menurut

Brown, politik internasional dapat dipahami sebagai sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar (Brown, 2008). Kesimpulan dari pandangan tersebut adalah, bahwa dalam suatu sistem internasional pola perilaku negara didasarkan pada kepentingan nasional dan aspek yang mempengaruhi. Menurut Jack C Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, kesejahteraan ekonomi dan prestise (Juanda, 1998).

Politik luar negeri yang dilakukan suatu negara dalam pencapaian kepentingan nasionalnya dapat berubah sewaktu-waktu. Namun demikian, untuk dapat memahami perilaku politik luar negeri yang dinamis, William D. Coplin mengidentifikasi dalam empat determinan politik luar negeri (Coplin, 1992)). *Pertama*, adalah konteks internasional, yang artinya, situasi politik internasional yang sedang terjadi pada waktu tertentu dapat mempengaruhi bagaimana negara tersebut akan berperilaku. Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomi, dan politik. Faktor *kedua*, adalah perilaku para pengambil keputusan. Perilaku pemerintah yang dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan individu dalam pemerintahannya menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan luar negeri. *Ketiga*, kondisi ekonomi dan politik suatu negara yang dalam hal ini dapat mempengaruhi dalam interaksi negara tersebut terhadap negara lain. Faktor *terakhir* adalah, situasi

politik dalam negeri yang berpengaruh pada perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri.

Menurut Nuechterlein terdapat empat dimensi di dalam kepentingan nasional, yaitu: kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi dan kepentingan ketertiban dunia. Kepentingan pertahanan merupakan perlindungan suatu negara dan warga negaranya terhadap ancaman kekerasan fisik yang diarahkan dari negara lain atau ancaman dari negara lain terhadap sistem pemerintahan. Kepentingan ekonomi merupakan stabilitas perekonomian suatu negara dalam interaksi dengan negara lain. Kepentingan ketertiban dunia bertujuan untuk menjaga politik internasional dan sistem ekonomi dengan tujuan negara tersebut merasa aman dan warga negaranya dapat beraktivitas dengan baik di luar negara tersebut. Kepentingan ideologi adalah perlindungan terhadap nilai-nilai yang di anggap penting dan juga di yakini oleh warga negaranya (Nuechterlein, 1976).

Dalam kaitannya dengan latar belakang diatas, yang menjadi faktor awal Jepang menggagas SSEAYP adalah untuk mengembalikan kepercayaan negara-negara Asia Tenggara terutama negara bekas jajahan Jepang dan selanjutnya memelihara hubungan kerjasama negara anggota ASEAN. Kerjasama internasional yang terjaga dengan baik dapat meminimalisir konflik antar negara dan menjaga stabilitas keamanan negara-negara terkait.

2. Teori soft diplomacy

Dalam melaksanakan politik luar negeri, suatu negara menggunakan diplomasi, karena tujuan umum diplomasi adalah untuk mencapai tujuan nasional atau memajukan kepentingan nasional. Definisi diplomasi sangat beragam seperti menurut *The Oxford English Dictionary* bahwa diplomasi adalah manajemen hubungan internasional melalui negosiasi dimana

hubungan tersebut diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil negara atau seni para diplomat. Namun secara garis besar pengertian diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (Panikar, 1991).

Soft diplomacy atau soft power diplomacy disini lebih mengutamakan interaksi semua pihak yang terlibat. *Soft power diplomacy* ini salah satunya dimunculkan oleh Joseph Nye (1990) (Nye, Jr. , 2008), yang mendefinisikan konsep soft power diplomacy sebagai kemampuan suatu negara untuk mencapai keinginannya melalui atraksi, termasuk kebudayaan, nilai, kebijakan luar negeri, dan sejenisnya yang tidak terkait dengan unsur ‘pemaksaan’ dalam bentuk militer maupun kecaman. Definisi tersebut diperbarui oleh Josep Nye menjadi kemampuan untuk mempengaruhi negara lain melalui kerjasama dalam membentuk agenda, mengajak serta melakukan kegiatan positif bersama untuk memperoleh hasil yang diinginkan (Nye , 2004).

Penulis mangambil teori tersebut untuk menyimpulkan strategi yang dibuat Jepang dengan menjadi sponsor utama dan mengajak negara-negara ASEAN unuk ikut serta dalam program SSEAYP, agar kedepannya dapat terpelihara hubungan kerjasama secara berkelanjutan mengingat program tersebut diadakan setiap tahun.

3. Konsep pencitraan

Citra merupakan suatu hal yang dapat membantu memberikan alasan yang dapat diterima secara subjektif tentang mengapa segala sesuatu hadir sebagaimana tampaknya tentang preferensi politikataupun yang lainnya. Pencitraan berasal dari dalam namun dapat dinilai oleh pihak luar. Penilaian atau tanggapan suatu negara ataupun masyarakat tersebut dapat menimbulkan kesan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan kredibilitas suatu negara. Adapun pengertian pencitraan

menurut aleksius Jemadu adalah upaya suatu bangsa untuk mendefinisikan dirinya baik kepada rakyatnya sendiri maupun dalam pergaulan internasional dengan menonjolkan keunggulan nilai-nilai budaya yang dimilikinya dengan tujuan politikluar negeri dan diplomasi secara umum (Jemmadu, 2008).

Dengan adanya sejarah buruk yang pernah diciptakannya sendiri, kini Jepang berusaha untuk mengembalikan lagi kepercayaan internasional dengan membuat citra positif salah satunya dibidang sosial dan budaya. SSEAYP dengan Jepang sebagai sponsor utama, memfasilitasi pemuda-pemuda dari negara-negara ASEAN dan Jepang itu sendiri untuk menimba pengalaman di kancah internasional selain itu juga membekali dengan pelatihan kepemimpinan. Yang tak kalah pentingnya, program tersebut juga menguntungkan bagi semua negara untuk mempertunjukkan budaya dan memperkenalkan pariwisata setiap negara, sehingga diharapkan dapat mengundang banyak wisatawan untuk mengeksplorasi budaya dan pariwisata masing-masing negara. Yang berujung pada pemasukan devisa dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

F. Hipotesa

Yang menjadi faktor pendorong Jepang untuk menjadi sponsor terbesar dalam SSEAYP adalah:

1. Untuk mendapatkan image positif di kancah internasional terutama di Asia tenggara.
2. Untuk mewujudkan kerjasama internasional berkelanjutan demi stabilitas perekonomian dan keamanan negara.

G. Metode Penelitian

Dalam Skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *library research* atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan

menganalisa data yang diambil dari buku-buku atau pustaka, makalah, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, website serta berbagai media lain. Dan sumber-sumber lain yang memiliki hubungan dengan topik yang diambil penulis (Singarimbun & Effendi).

H. Jangkauan Penulisan

Penelitian dengan judul “*SSEAYP (SHIP FOR SOUTH EAST ASIAN YOUTH PROGRAM) DALAM PERSPEKTIF POLITIK LUAR NEGERI JEPANG* ” dibatasi dengan fakta-fakta yang terjadi di era pemerintahan Jepang pasca Perang Dunia II, tetapi tidak menutup kemungkinan pada tahun terkini yang masih relevan dengan pokok permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam hal penulisan dan pencarian data ini akan menggunakan studi literatur yaitu dari buku, majalah, artikel, internet, maupun multimedia. Dalam perkembangannya nanti akan dijabarkan menjadi beberapa bab, antara lain :

Bab 1, yang berisi tentang pengenalan terhadap latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran yang digunakan, hipotesa, dan sistematika penulisan.

Bab 2, menjabarkan tentang program SSEAYP (*Ship for South-East Asia Youth*) Program meliputi latar belakang, tujuan dan manfaat program SSEAYP.

Bab 3, menjabarkan tentang Politik Luar Negeri Jepang Pasca Perang Dunia II

Bab 4, menjabarkan tentang bagaimana politik luar negeri Jepang di Asia Tenggara melalui program SSEAYP

Bab 5, merujuk pada kesimpulan akhir penulis

